



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024



RS JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat menyelesaikan penyusunan RENCANA KERJA OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Tahun 2024.

Pada dasarnya Renja merupakan dokumen Rencana Kerja yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk Tahun Anggaran 2024 dan sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja, baik kinerja kegiatan maupun kinerja keuangan. Dalam penyusunan Rencana Kerja, RS Jiwa Prof HB Saanin Padang mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Rumah Sakit. Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Rumah Sakit dalam menyesuaikan perubahan kegiatan dan anggaran organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder RS Jiwa Prof HB Saanin Padang.

Renja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rancangan Teknokratis Rencana Strategis (RENSTRA) RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Tahun 2021 – 2026 yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renja OPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2024.

Tak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Padang, Juli 2023

Direktur

RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang



dr. Aklima, MPH

NIP. 19680203 200212 2 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| | |
| Bab I Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 3 |
| C. Maksud Dan Tujuan | 6 |
| D. Sistematika Penulisan | 6 |
| Bab II Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 | |
| A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 Dan Capaian Renstra SKPD..... | 9 |
| B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 30 |
| C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD | 34 |
| D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 37 |
| E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 37 |
| Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | |
| A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... | 41 |
| B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 41 |
| C. Program dan Kegiatan | 42 |
| Bab IV Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... | 45 |
| Bab V Penutup..... | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan pelayanan rumah sakit pada dasarnya berkesinambungan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik, dalam mengatasi peningkatan derajat kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang harus melibatkan berbagai pihak. Rumah Sakit Jiwa sebagai institusi kesehatan harus menerapkan prinsip *clinical governance* dan *corporate governance* yang berfokus kepada kesehatan pasien, pembuktian ilmiah, dan sejalan dengan tindakan profesional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit perlu memperhatikan tugas klinik dengan prinsip kaidah *clinical governance* dan organisasi rumah sakit yang baik dengan prinsip *good corporate governance* sehingga akan menjadikan rumah sakit yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Rencana kerja tahunan SKPD RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang disusun bertujuan untuk mencapai sasaran pelayanan kepada masyarakat sebagai urusan wajib berupa pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan rujukan sebagai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A. Latar Belakang

1. Pengertian Rencana Kerja.

Rencana kerja (renja) disusun untuk kegiatan kurun waktu satu tahun dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran utama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan rujukan terutama pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Sumatera Barat.

2. Proses Penyusunan Renja SKPD.

Proses Penyusunan rencana kerja tahun 2024 berpedoman kepada Permendagri No 86 Tahun 2017 yaitu Rancangan Renja SKPD provinsi dan kabupaten / kota disusun mengacu pada rancangan awal RKPD; mengacu pada Renstra SKPD; mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; untuk memecahkan masalah yang dihadapi; berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Proses penyusunan Rencana Kerja RS Jiwa Prof.HB Saanin Padang Tahun 2024 dengan pembentukan Tim Perumus Renja 2024 bekerja dengan cara: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan OPD dengan provinsi; meninjau hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD; penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD provinsi; penelaahan rancangan awal RKPD provinsi; perumusan tujuan dan sasaran; penelaahan usulan masyarakat; dan perumusan kegiatan prioritas.

3. Keterkaitan Renja OPD, dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi.

Rencana kerja 2024 RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang mengacu pada RPJMN

2020-2024 berupa tujuh agenda prioritas dengan fokus pada prioritas ketiga meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan strategi pada dimensi Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia Sehat. Kemudian juga berpedoman kepada Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan tema “Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selain dari itu berpedoman pada Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024 dengan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi - tingginya melalui Program Indonesia Sehat dengan fokus penguatan pelayanan kesehatan melalui paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pemantapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Arah kebijakan Kementerian Kesehatan 2020-2024 adalah Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care), Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) dan Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk).

Rencana kerja 2024 ini juga berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 dengan melanjutkan 2 Program prioritas dengan fokus prioritas pada Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, yang dijabarkan pada rencana strategis (Renstra) RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang 2022–2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari Kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Sesuai perkembangan yang terjadi saat ini RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang adalah institusi sarana pelayanan kesehatan jiwa yang tidak hanya berfungsi sosial, tetapi telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang harus dapat mengoptimalkan pendapatannya dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan jenis-jenis pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang, diperlukan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan yang dijabarkan dalam beberapa dokumen perencanaan sesuai waktu pelaksanaannya.

Rencana Kerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2022-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Dokumen perencanaan tahunan tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang tahun 2024 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Unit kerja di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan, wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kerja tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan kebijakan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bidang

kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2024.

4. Tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Tahun 2024 ini merupakan proses penyusunan anggaran masing-masing OPD untuk disampaikan dalam RAPBD Tahun 2024. Pedoman penyusunan RENJA Tahun 2024 juga memperhatikan realisasi program dan kegiatan Tahun 2022 dan proyeksi pencapaian realisasi kegiatan Tahun 2024.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun Anggaran 2024, sejumlah peraturan Perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan RENJA OPD adalah :

1. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Undang-undang Nomor: 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana dibah dengan Praturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Ranperda APBD, Perubahan APBD, Ranperkada Penjabaran APBD, Ranperkada Penjabaran Perubahan APBD
17. Permendagri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Perubahan atas Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024.
25. Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak lanjut PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

- sebagaimana perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
 31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Datuak Tan Pari.
 32. Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada BLUD RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.
 33. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 34. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan.
 35. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 440-538-2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB.Saanin Padang Untuk Melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh.
 36. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/655/XI/P2EPD/Bappeda-2022 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 37. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 005/487/VII/P2EPD/Bappeda-2023 perihal Penyampaian Renja Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja Tahun 2024 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah untuk mencapai Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa**. Adapun sasaran tersebut terdiri dari dua indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit
2. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan OPD dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2022, perkiraan capaian tahun 2022, kaitan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun lalu.

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menguraikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, juga menguraikan koordinasi dan sinergi program antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota serta dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat dalam pencapaian kinerja pembangunan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tupoksi OPD. Dampak pencapaian visi dan misi Kepala daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional seperti SPM dan SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Juga formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat uraian proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut dan penjelasan temuan setelah proses review dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota.

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Menguraikan tentang telaah terhadap kebijakan Nasional dan Daerah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah terkait Tupoksi OPD.

B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi OPD.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dari kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra SKPD.

Indikator kinerja utama (IKU) Renstra RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI (%) | % |
|--|---|------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa | Tingkat Akreditasi RS | Paripurna | Paripurna | 100% |
| | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 90% | 91,98% | 102% |
| Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa | Percentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis | 90% | 100% | 111% |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Nilai Evaluasi SAKIP | BB (79,5%) | A (80,75) | 101,5% |
| Meningkatkan Kemandirian Keuangan RS | Tingkat Kemandirian Keuangan | 44% | 54,75% | 124,5% |

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa

Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai, diwujudkan dengan 2 (dua) sasaran yaitu meraih akreditasi paripurna rumah sakit dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a. Sasaran 1:

Pada sasaran 1 diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

1. Tingkat akreditasi Rumah Sakit dan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS.

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

| TABEL 2 | | Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa | | |
|---------|--|---|-----------|---------|
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tingkat Akreditasi RS | Paripurna | Paripurna | 100% |
| 2 | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan Rumah Sakit | 90% | 91,98 | 102% |

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 2, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2022, rata-rata sebesar 102% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Dari 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran 1 (satu), 2 indikator diatas melebihi target yang ditetapkan. Selanjutnya capaian masing masing indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1). Tingkat Akreditasi Rumah Sakit

Pada mulanya tahun 2003 Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah terakreditasi lulus penuh tingkat dasar, yang awalnya hanya mencakup 5 (lima) pelayanan, kemudian meningkat dan terus berkembang, pada Tahun 2011 sudah mencakup 12 jenis pelayanan, yang meliputi: administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, rekam medis, instalasi farmasi, laboratorium, K3 dan pengendalian infeksi nosokomial, instalasi radiologi, gizi, dan rehabilitasi medik. Pada Tahun 2016 telah lulus akreditasi versi 2012 dengan predikat paripurna. Kemudian tahun 2019 pada survei Akreditasi versi SNARS Edisi 1 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin lulus dengan Peringkat Dasar. Dengan semangat yang tinggi dan usaha yang keras akhirnya pada tahun 2022 pada survei Akreditasi versi LARSDHP RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang kembali meraih predikat paripurna.

Berdasarkan target yang ditetapkan, maka Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah meraih target yang ditetapkan yaitu terakreditasi paripurna.

2). Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan Rumah Sakit

Kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan di RS.Jiwa Prof.HB Saanin Padang dengan 18 elemen indeks kepuasan yang sudah ditetapkan Kemenpan dapat diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Untuk

menjaga hasil survei tetap valid, pihak rumah sakit menyerahkan pelaksanaan survei kepada pihak yang independen dalam hal ini diluar RS. Pada tahun 2022 ini survei dilakukan oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Andalas Padang.

Realisasi IKM tahun 2022 adalah 91,98 %. Bila dibandingkan dengan target nilai IKM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan (90%), maka dapat diketahui persentase capaian IKM tahun 2022 adalah sebesar 102%, ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**. Secara Nasional berdasarkan Permenpan & RB RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, nilai IKM RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang termasuk pada rentang nilai 88,31 – 100 dengan kategori **Sangat Baik**.

Pada tahun 2022 penilaian IKM dilakukan satu periode, yang dilakukan oleh lembaga independen (eksternal) dengan hasil rata rata 91,98 %.

Jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

| Tabel. 3 | | Pengukuran Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 | 85 | 85 | 86,07 | 90 | 93,84 | 90 | 90,18 | 90 | 91,98 |

| No | Indikator Kinerja | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----|----------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 | 85 | 85 | 86,07 | 90 | 93,84 | 90 | 90,18 | 90 | 91,98 |

Trend Perkembangan Nilai IKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa nilai IKM tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Kenaikan tersebut salah satunya di latar belakangi oleh peningkatan kualitas pelayanan sehingga mendapat respon positif dari masyarakat.

Pencapaian IKM tahun 2022 dengan kategori **Sangat Baik** sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh rumah sakit diantaranya:

- a) Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan khususnya yang meningkatkan pelayanan publik. Dengan biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 46.000.000 berasal dari dana RBA BLUD.
- b) Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi sebesar 2.594.494.151 dari APBD.
- c) Pemberian informasi secara kontinu kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (papan informasi, spanduk dan publikasi media cetak maupun elektronik). Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut Rp. 57.500.000,- dari dana RBA BLUD.
- d) Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan ruangan pengaduan dan memperbanyak kotak pengaduan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhannya.
- e) Untuk penanganan Covid-19 pada RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut adalah pembayaran insentif nakes dan non nakes penanganan Covid-19 adalah Rp. 442.796.216 berasal dari dana DAU APBD.

Sementara masih diperlukan perbaikan dan peningkatan tentang perilaku petugas dan sarana dan prasana pendukung pada poliklinik seperti :

- a) Mensosialisasikan keberadaan unit pengaduan pelayanan dan fasilitas pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat seperti aplikasi pengaduan SP4N LAPOR, pengaduan via whatsapp, email, dll.
- b) Menempatkan alur pengaduan yang mudah dan jelas agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat apabila akan menyampaikan pengaduan pelayanan di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.
- c) Untuk mempermudah penyampaian pengaduan di masa transisi dari manual ke digital, diusulkan untuk menempatkan papan tulis (*White board*) pada ruang-ruang layanan publik, sehingga masyarakat bisa menuliskan keluhan secara langsung pada papan tersebut dan hasilnya dapat di rekap harian oleh Tim Pengaduan Pelayanan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.
- d) Memberikan informasi terkait kedatangan dokter
- e) Petugas memulai pelayanan sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan
- f) Menjaga stabilitas jaringan internet agar melancarkan proses input resep pasien BPJS.
- g) Meningkatkan kinerja cleaning service agar lebih intensif untuk membersihkan toilet dan menjaga ketersediaan air di toilet.

- h) Meningkatkan maintenance Gedung, dengan melakukan pengecatan ulang ruangan dan juga melengkapi sarana penerangan di bagian Gedung/ruangan yang sering di akses, sehingga terlihat bersih dan nyaman sehingga masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang ada di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.

2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Non Jiwa

Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima meliputi upaya kesehatan diluar psikiatri (Penyakit dalam, Syaraf, Anak, Gigi/Mulut dan Rehabilitasi Medik) baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai, diwujudkan dengan 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima. Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis.

| TUJUAN 1 | SASARAN 1 |
|---------------------------|---|
| Menurunnya angka kematian | Meningkatnya pelayanan kesehatan non jiwa yang mendukung pelayanan kesehatan jiwa prima |

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 4:

| TABEL. 4 | Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima | | | |
|----------|---|--------|-----------|---------|
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis | 90% | 100% | 111% |

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2022 adalah 111% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Dari 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran 2 (dua): hasilnya melebihi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1) Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis

Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis adalah jumlah pasien non psikiatri (penyakit dalam, penyakit syaraf, anak, dan pelayanan gigi) yang ditangani oleh dokter spesialis dibanding dengan jumlah pasien non psikiatri yang datang berobat x 100.

Realisasi Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2022 adalah 100%. Bila dibandingkan dengan target Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang yang telah ditetapkan (90%), ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun sebelumnya dapat dilihat dari table 5 dibawah ini:

| Tabel. 5 | | Pengukuran Indikator Kinerja: Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| No | Indikator Kinerja | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | Targ et | Realisasi | Targ et | Realisasi | Targ et | Realisasi | Targ et | Realisasi | Targ et | Realisasi |
| 1 | Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis | 75 | 98,9 | 80 | 98,43 | 85 | 89,07 | 90 | 98,91 | 90 | 100 |

Trend Perkembangan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan hasil persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2022 realisasinya meningkat dari tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang untuk Penambahan Pelayanan Non Jiwa di luar Pelayanan Jiwa yang dilayani oleh dokter spesialis seperti Spesialis Penyakit dalam, Spesialis Syaraf dan Anak. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2016-2021 yaitu sebesar 90%, pencapaian Tahun 2022 melebihi target Renstra dengan selisih sebesar 10%.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

| Tujuan 1 | Sasaran 1 |
|-----------------------------|---|
| Terwujudnya RS yang Mandiri | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi |

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut:

| Tabel 6 | | Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Tatakelola Rumah Sakit | | |
|---------|---------------------------|--|-----------|---------|
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD | BB (79,5) | A (80,75) | 101,5% |

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 6 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2022 berdasarkan Nilai SAKIP sebesar 101,5% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1) Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja RS. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP.

Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen: Komponen pertama adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Komponen kedua adalah pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran. Komponen ketiga adalah pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Komponen ke empat adalah evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi dan komponen ke lima adalah pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja lainnya.

Realisasi SAKIP tahun 2022 merupakan hasil penilaian dari LAKIP Tahun 2021 dengan nilai adalah BB (80,75). Bila dibandingkan dengan target nilai LAKIP RS.Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan BB (79,5), maka dapat

diketahui persentase capaian nilai LAKIP Tahun 2021 adalah sebesar 101,5%, ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**. Realisasi nilai LAKIP tahun 2017 – 2021 dapat dilihat dari tabel.10 dibawah ini:

| Tabel. 7 | | Pengukuran Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Indikator Kinerja | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----|---------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi |
| 1 | Nilai Evaluasi Sakip SKPD | 70 | 73,31 | 70 | 75,22 | 70 | 79,15 | 76 | 79,22 | 79,5 | 80,75 |

Perkembangan Nilai LAKIP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai LAKIP mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, berada pada kategori A dengan nilai 80,75.

Pencapaian LAKIP pada tahun 2021 dengan kategori **Sangat Baik** sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit diantaranya:

- Melibatkan semua unsur bidang/ bagian untuk terlibat dalam perencanaan sehingga perencanaan menjadi suatu acuan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan.
- Melakukan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk setiap triwulan sehingga dapat diantisipasi segala kendala dengan cepat.
- Melakukan pengukuran terhadap kinerja eselon III dan eselon IV.
- Melakukan pelaporan capaian kinerja melalui e-SAKIP.

Untuk peningkatan penilaian LAKIP dimasa yang akan datang diperlukan:

- Pengembangan IT dalam pengukuran kinerja
- Melakukan analisis efisiensi program kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun.
- Melakukan Revisi Renstra sesuai perubahan Perundang-undangan.
- Melakukan perbaikan case canding terhadap Kinerja eselon II ke Eselon III dan Eselon IV.

4. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

Tujuan Meningkatnya kemandirian Rumah Sakit menggambarkan kemampuan RS dalam melaksanakan tata kelola RS dan membiayai seluruh pengeluaran baik operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan RS, kemampuan dalam mengelola SDM dan tata kelola RS. Tujuan kedua dapat diukur dengan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian keuangan RS.

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)

| TUJUAN 1 | SASARAN 1 |
|-----------------------------|---|
| Terwujudnya RS yang Mandiri | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah sakit |

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 8 sebagai berikut:

| TABEL 8 | | Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah sakit(TKK) | | |
|---------|---------------------------------------|---|-----------|---------|
| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK) | 44 % | 54,78% | 124,5% |

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 8 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tata kelola di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2022 berdasarkan realisasi capaian sebesar 124,5% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1). Tingkat Kemandirian keuangan RS (TKK)

Tingkat Kemandirian Keuangan merupakan salah satu indikator kinerja keuangan rumah sakit. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS membiayai seluruh biaya rumah sakit, dari pendapatan murni rumah sakit.

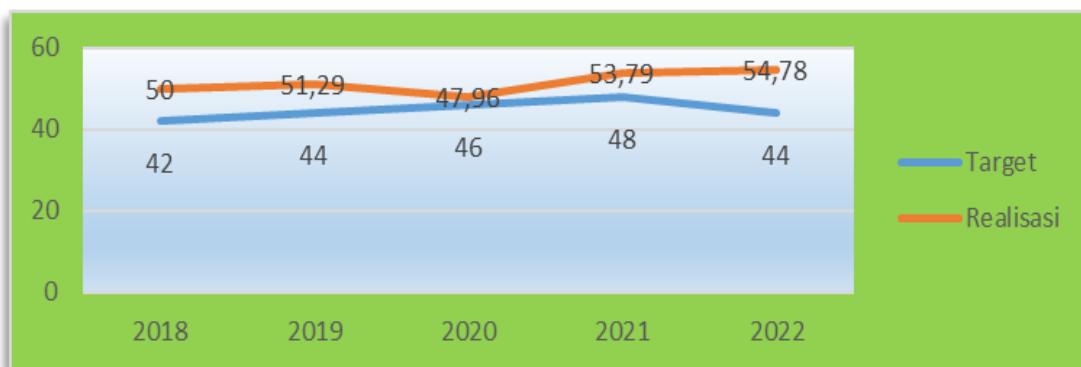
TKK adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan RS menutupi biaya (Cost) dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan pelayanan pasien (Revenue). TKK dihitung dari persentase perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya belanja rumah sakit dengan nilai idealnya diatas 40%.

Realisasi TKK Tahun 2022 sebesar 54,78%, hal ini menunjukkan persentase capaian TKK Tahun 2022 adalah sebesar 124,5%. Dengan skala penilaian **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan TKK secara nasional adalah minimal 40%, TKK RS Jiwa Prof HB Saanin sudah berada pada rentang diatas Standar Minimal Nasional.

TKK merupakan indikator yang baru diperhitungkan mulai tahun 2016, namun demikian pada laporan ini sebagai pembanding tingkat capaian dapat kita lihat pada tabel berikut:

| Tabel. 9 | | Pengukuran Indikator Kinerja: Persentase (%)TKK | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--|--|
| No | Indikator Kinerja | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | |
| | | Tar get | Capa ian | Tar get | Capai an | | |
| 1 | Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) | 42 | 50 | 44 | 51,29 | 46 | 47,96 | 48 | 53,79 | 42 | 54,78 | | |

Trend Perkembangan TKK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa TKK tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021. Pada tahun 2021 tingkat kemandirian rumah sakit sebesar 53,79 % menjadi 54,78% di tahun 2022.

Pencapaian TKK tahun 2022 dengan kategori **Sangat Baik** didukung oleh Pendapatan RS, Belanja APBD dan Belanja BLUD, diantaranya :

1. Target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp. 24.900.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.781.981.426,- dengan pencapaian 119.61%.
2. Belanja APBD dimana target belanja APBD sebesar Rp. 26.799.494.151,- terealisasi sebesar Rp. 25.387.099.320,- dengan persentase realisasi sebesar 94,78%. Kegiatannya diantaranya Kegiatan Administrasi

keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN), Penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan), Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Operasional Pelayanan Rumah Sakit).

3. Belanja BLUD target belanja Rp. 29.559.059.508,- realisasi Rp. 28.976.988.707, dengan persentase capaian 98,03%, kegiatannya adalah peningkatan pelayanan BLUD RS.

b. Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan suatu badan publik dapat dilihat keberhasilannya dengan menilai perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rasio tersebut antara lain :

Pertama Rasio efektifitas yaitu pengukuran untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang menggambarkan data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \text{Realisasi pendapatan} / \text{Target pendapatan} \times 100\%$$

Kedua Rasio Efisiensi untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data realisasi belanja dan target anggaran belanja. Dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{realisasi belanja} / \text{target anggaran belanja} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil kinerja anggaran RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Tahun anggaran 2022.

1) Pendapatan Pelayanan BLUD

Selanjutnya untuk capaian kinerja keuangan dalam hal ini realisasi pendapatan pelayanan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2022

| NO. | JENIS PENERIMAAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | PENDAPATAN OPERASIONAL PELAYANAN | 24.360.000.000 | 29.020.166.035 | 119,13% |
| | - Operasional Pelayanan | | 21.406.025.535 | 87,87% |
| | - Pendapatan Layanan Klaim Covid-19 | | 7.614.140.500 | 31,26% |
| 2 | PENDAPATAN USAHA | 540.000.000 | 761.815.391 | 141,08% |
| | TOTAL | 24.900.000.000 | 29.781.981.426 | 119,61% |

RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan SKPD dengan PPK BLUD sehingga pendapatan dihasilkan dari Pelayanan BLUD dan pendapatan lain yang sah. Secara umum pendapatan pelayanan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang terjadi kenaikan pendapatan sehingga dapat melebihi target yaitu sebesar 119,61%, meliputi pendapatan operasional pelayanan sebesar Rp. 29.020.166.035,- dan dari pendapatan usaha sebesar Rp. 761.815.391.

Target pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 24.900.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.781.981.426,- dengan pencapaian 119,61%. Berdasarkan hal tersebut maka Rasio Efektifitas dari kinerja keuangan termasuk kategori **Sangat baik**. Pendapatan melebihi target, walapun masih adanya penurunan kunjungan pasien ke RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang akibat mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RS kelas D,C,B dan A dan karena terjadinya pandemi covid-19 akan tetapi klaim pembayaran BPJS khusus pasien jiwa, pasien umum dan pasien Covid-19 sudah cair dan bisa meningkatkan pendapatan RS pada tahun 2022.

2) Belanja Anggaran OPD

Capaian kinerja keuangan dalam hal ini realisasi belanja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 11. Realisasi Belanja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Tahun 2022

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 53.319.059.508 | 51.644.733.039 | 96,86 |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 23.760.000.000 | 22.667.744.332 | 95,40 |
| | | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.760.000.000 | 22.667.744.332 | 95,40 |
| | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 29.559.059.508 | 28.976.988.707 | 98,03 |
| | | - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 29.559.059.508 | 28.976.988.707 | 98,03 |
| B | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | 3.039.494.151 | 2.719.539.988 | 89,47 |
| 2 | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 2.594.494.151 | 2.276.743.772 | 87,75 |
| | | a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 1.144.300.000 | 886.366.927 | 77,46 |
| | | - Jasa Konsultasi Pengawasan DAK Fisik | 47.300.000 | 46.633.764 | 98,59 |
| | | - Belanja Modal Pembangunan dan Rehabilitasi Laboratorium DAK | 1.097.000.000 | 839.733.163 | 76,55 |
| | | b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 1.450.194.151 | 1.390.376.845 | 95,88 |
| | | 1).Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya | 91.470.500 | 88.278.300 | 96,51 |
| | | Mesin Cuci | 56.659.353 | 56.610.000 | 99,91 |
| | | Mesin Pengering | 34.811.147 | 31.668.300 | 90,97 |
| | | 2).Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 306.751.640 | 303.795.377 | 99,04 |
| | | - Penyediaan Alat Kesehatan DBHCHT | 158.529.500 | 156.811.577 | 98,92 |
| | | Instrumen Cabinet | 9.073.000 | 9.073.000 | 100 |
| | | Kursi Roda | 6.292.000 | 6.292.000 | 100 |
| | | Matras | 91.371.494 | 90.548.361 | 99,10 |
| | | Tensimeter | 3.079.990 | 2.185.200 | 70,95 |
| | | Tensimeter digital | 41.065.116 | 41.065.116 | 100 |
| | | Trolley Redressing | 7.647.900 | 7.647.900 | 100 |
| | | - Penyediaan Alat Kesehatan IGD (DAK) | 148.222.140 | 146.983.800 | 99,16 |
| | | Bed Patient Electrik | 53.560.980 | 53.551.300 | 99,98 |
| | | EKG | 57.828.660 | 56.600.000 | 97,88 |
| | | Suction Pump | 36.832.500 | 36.832.500 | 100 |
| | | 3).Belanja Modal Alat Laboratorium Umum (DAK) | 378.299.324 | 342.727.658 | 90,60 |
| | | Serologi Imunologi (ElA/ELISA/Peralatan Elisa Enzim) | 378.299.324 | 342.727.658 | 90,60 |
| | | 4).Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia (DAK) | 243.500.000 | 232.222.980 | 95,37 |
| | | Blood Gas Analyzer/Analisa Gas Darah | 243.500.000 | 232.222.980 | 95,37 |
| | | 5).Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic | 430.172.687 | 423.352.530 | 98,41 |
| | | X-Ray Mobile | 430.172.687 | 423.352.530 | 98,41 |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 445.000.000 | 442.796.216 | 99,50 |
| | | - Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 445.000.000 | 442.796.216 | 99,50 |
| | | TOTAL | 56.358.553.659 | 54.364.273.027 | 96,46 % |

Secara umum capaian realisasi belanja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2022 sebesar 96,46% yaitu dengan total Rp. 54.364.273.027,- dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 56.358.553.659,-. Pada tahun 2022 RS Jiwa Prof.HB.Saanin memiliki tiga (3) program, adapun realisasi per program kegiatan sebagai berikut.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a) Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sampai Bulan Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 22.667.744.332,- dengan pencapaian keuangan 95,4%. Permasalahan tidak ditemukan karena gaji dan tunjangan ASN merupakan kegiatan rutin yang memang harus dilaksanakan.

b) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang

Dari target anggaran BLUD untuk kegiatan pelayanan BLUD sebesar Rp.29.559.059.508,- terealisasi sebesar Rp. 28.976.988.707,- dengan pencapaian (Keuangan = 98%, Fisik =100%). Kegiatan tercapai fisik 100%, realisasi anggaran pembayaran sesuai kegiatan, terdapat efisiensi anggaran. Dampak dari kegiatan pelayanan BLUD ini adalah berpengaruh besar pada capaian indikator kinerja utama yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 91,98%, menurunnya Avlos menjadi 23 hari dan Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) 54,78%. Meningkatnya pelatihan pada petugas RS, meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS, tercapainya kalibrasi alat kesehatan tepat waktu, disamping terwujudnya pelayanan promosi kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan disiplin aparatur.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

a) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Dari ketersediaan dana APBD untuk Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (DAK) Rp. 1.144.300.000,-

terealisasi sebesar Rp. 886.366.927,- dengan pencapaian (Keuangan = 77,46%, Fisik = 100%). Hasil pekerjaan kegiatan sudah selesai sesuai dengan kontrak sehingga tercapai fisik 100%, terdapat sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp. 257.933.073,- merupakan efisiensi tender dengan evaluasi penawaran harga terendah. Perencanaan anggaran dan pengadaan kegiatan sudah mengacu pada analisis PU dan DED penyedia serta ini merupakan hasil efisiensi dari proses tender dengan evaluasi metode pemilihan penyedia dengan harga terendah. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitas Gedung RS yang direhab dan dipelihara secara 100%.

b) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Dari ketersediaan dana APBD untuk Alat Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan (DAK) Rp. 770.021.464,- terealisasi sebesar Rp. 721.934.438,- dengan pencapaian (Keuangan = 93,76%, Fisik = 100%), dan alat kesehatan yang sumber dana dari DBHCHT dengan anggaran Rp.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 245.089.877,- dengan pencapaian (Keuangan = 98,04%, Fisik 100%). Hasil pekerjaan kegiatan sudah selesai sesuai dengan kontrak sehingga tercapai fisik 100% Pembayaran sesuai dengan kontrak, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 59.817.306,-. Dampak dari kegiatan ini adalah tersedianya alat kesehatan/penunjang medik RS.

2. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Ketersediaan dana APBD bersumber dari dana DAU yaitu dengan pagu anggaran Rp. 445.000.000,- terealisasi Rp. 442.796.216 dengan pencapaian keuangan 99,50% dan fisik 100%. dalam sub kegiatan ini terdiri dari pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 selama tiga bulan (Februari, Maret dan April) dan pembayaran insentif non tenaga kesehatan yang menangani covid-19 dari bulan Februari-April 2022. Pencapaian keuangan sudah melebihi target untuk Tenaga kesehatan yang menangani

pasien Covid-19 pada tahun 2022. Pembayaran bisa dibayarkan hanya untuk tiga bulan dikarenakan tidak adanya pasien Covid-19 yang ditangani di bulan-bulan berikutnya.

c. Pencapaian Target Renstra SKPD berkaitan dengan RENJA SKPD Tahun - tahun sebelumnya.

Pencapaian target renstra RS Jiwa Prof HB.Saanin Padang secara umum sudah cukup memadai sesuai target yang telah ditetapkan, namun demikian perlu meningkatkan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan pada rencana kerja Tahun selanjutnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut:

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2022

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi/Kel | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|--|--|---|
| | | | | | | | I | | | | II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) = 8+9+10+11 | (13) = 12/7 * | (14) = 6+12 | (15) = 14/5 * | (16) | (17) | (18) | (19) | (16) | (17) | (18) | (19) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| | | PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 18.753.782.762 | 2.912.417.729 | 4.320.483.509 | | 0 | 403.331.927 | 1.123.641.803 | 1.192.566.258 | | 2.719.539.988 | | 62,95 | | 5.631.957.717 | | 30,03 | | | | | | | | | | |
| 1.02.02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 18.753.782.762 | 90,18 | 2.912.417.729 | 88 | 4.320.483.509 | 0 | 0 | 0 | 403.331.927 | 0 | 1.123.641.803 | 0 | 1.192.566.258 | 0 | 2.719.539.988 | 0,00 | 62,95 | 90,18 | 5.631.957.717 | inf | 30,03 | | | | | |
| 1.02.02.1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah pengadaan prasarana fasilitas di rumah sakit | % | 275 | 17.149.000.000 | 100 | 2.240.973.315 | 90 | 3.875.483.509 | 5 | 0 | 8 | 0 | 34 | 1.084.177.514 | 2 | 1.192.566.258 | 49 | 2.276.743.772 | 54,44 | 58,75 | 149 | 4.517.717.087 | 54,18 | 26,34 | | | | |
| 1 | 1.02.02.1.01.03 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Pengembangan RS yang dibangun | unit | 5 | 4.548.000.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | nan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | RSJ SAANIN | | | | |
| 2 | 1.02.02.1.01.04 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah pengembangan fasilitas kesehatan lainnya yang terbangun | meter | 4 | 2.400.000.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | nan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | RSJ SAANIN | | | | |
| 3 | 1.02.02.1.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah fasilitas gedung RS yang direhab dan dipelihara | unit | 6 | 2.458.000.000 | 0 | 0 | 1 | 1.144.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.919.900 | 1 | 634.447.027 | 1 | 886.366.927 | 100,00 | 77,46 | 1 | 886.366.927 | 16,67 | 36,06 | RSJ SAANIN | Tidak ada permasalahan, fisik terlaksana 100%, realisasi keuangan 77,46%, kegiatan bersumber dari dana DAK | Melakukan percepatan proses jeling, melakukan koordinasi secara kentmu dengan UKPSJ 2. Mengupayakan koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD terkait perubahan pagu anggaran |
| 4 | 1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang tersedia | unit | 258 | 8.543.000.000 | 144 | 2.240.973.315 | 39 | 2.731.183.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 832.257.614 | 5 | 558.119.231 | 39 | 1.390.376.845 | 100,00 | 50,91 | 183 | 3.631.350.160 | 70,93 | 55,50 | RSJ SAANIN | Kegiatan Alat kesehatan, DAK dan DBHCHT, fisik sudah terealisasi 100%, realisasi keuangan 95,08% | Melakukan koordinasi dengan BPKAD untuk percepatan realisasi kegiatan DAK dan DBHCHT. | |
| 5 | 1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan dan alat penunjang medik yang dipelihara | unit | 1 | 600.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | nan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | RSJ SAANIN | | | | |
| 6 | 1.02.02.1.01.20 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas | Jumlah Telemedicine di fasilitas pelayanan | paket | 1 | 800.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | nan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | RSJ SAANIN | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/output | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi/Ket | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|-------------|------|-------------|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------------|--------|--------|------------|---------------|------|--------|------------|
| | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) = 8+9+10+11 | (13) = 12/17 * 100% | (14) = 6+12 | (15) = 14/15 * 100% | (16) | (17) | (18) | (19) | | | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan | kesehatan yang tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.02.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang tersedia | Jumlah Layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang tersedia | Kali | 5 | 1.804.782.762 | 0 | 671.444.414 | 1 | 445.000.000 | 0 | 0 0 | 403.331.927 | 0 | 39.464.289 | 0 | 0 0 | 442.796.216 | 0,00 | 99,50 | 0 | 1.114.240.630 | 0,00 | 89,43 | |
| 7 | 1.02.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Terselenggaranya layanan konseling yang dikelola | Kali | 5 | 785.000.000 | 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | nan | 0 | 0 0,00 | 0 0,00 | RSJ SAANIN | | | | |
| 8 | 1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Terlaksananya Pembayaran Insentif tenaga kesehatan | Bulan | | 819.782.762 | | 671.444.414 | 12 | 445.000.000 | 3 | 0 3 | 403.331.927 | 3 | 39.464.289 | 3 | 0 12 | 442.796.216 | 100,00 | 99,50 | 12 | 1.114.240.630 | inf | 135,92 | RSJ SAANIN |
| | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Disusun
....., 16-01-2023
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
PROVINSI SUMATERA BARAT
DIREKTUR,

Dievaluasi
Padang,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala

Medi Iswandi, ST,M.M

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target program kegiatan adalah:
 - a) Adanya kendala dalam klaim BPJS sehingga pendapatan RS tertunda.
 - b) Belum Optimalnya kepedulian dan pengetahuan dari SDM khususnya tenaga professional dan tingginya tuntutan masyarakat yang mengharuskan SDM selalu memgembangkan diri.
 - c) Terjadinya pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.
2. Faktor penyebab tercapainya target program kegiatan adalah:
 - a) Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Peningkatan kinerja yang sangat baik.
 - b) Terlaksananya fungsi rumah sakit yang selalu memberikan pelayanan dan kepuasan Peningkatan yang terbaik.
 - c) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan BLUD.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD

Capaian program Renstra SKPD Tahun 2022 rata-rata tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2022, sehingga secara keseluruhan target Renstra pada tahun ke-5 tahun 2022 terpenuhi.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengadaan sarana dan prasarana, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang bersumber pada APBD.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai PPK BLUD RSUD dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta dengan menggunakan manajemen resiko sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Perlunya upaya-upaya peningkatan pelayanan dibidang kesehatan jiwa melalui promosi dan penyuluhan terhadap masyarakat.

- c. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses peningkatan pelayanan kesehatan Jiwa prima.
- d. Perlunya upaya-upaya peningkatan diklat yang mantap melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat yang dibutuhkan.
- e. Perlu mempertahankan standar akreditasi Paripurna untuk tahun-tahun berikutnya.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana dalam memenuhi standar peralatan tipe Rumah Sakit.
- g. Mengembangkan pelayanan RS Non Kejiwaan (Penyakit Dalam, Anak, Syaraf, dan Rehab Medik).
- h. Melakukan efisiensi di belanja BLUD dengan memprioritaskan proses belanja.
- i. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
- j. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk proses pembayaran klaim Covid-19 yang status sudah sesuai dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang.
- k. Koordinasi dengan Kab/Kota terkait pembayaran Piutang Pasien Dinsos.
- l. Koordinasi dengan Kab/Kota terkait rujukan pasien jiwa

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja pelayanan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang berdasarkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RS Jiwa Prof. HB.Saanin Padang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Gawat Darurat:

Dari 9 Indikator SPM, 7 indikator sudah mencapai target, sedangkan 2 indikator belum memenuhi target SPM yaitu:

1. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS). Nilai masih dibawah standar karena adanya tenaga Instalasi Gawat Darurat yang masih menunggu jadwal pelatihan awal tahun 2023
2. Kematian pasien< 24 Jam. Nilai masih diatas 0% dikarenakan pada tanggal 31 Oktober 2022 pasien Tn. E meninggal sebelum 24 jam rawatan

b. Pelayanan Rawat Jalan;

Dari 6 indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

c. Pelayanan Rawat Inap

Dari 13 indikator SPM, 7 indikator memenuhi target SPM, sedangkan 6 indikator belum memenuhi target SPM yaitu:

- 1) Pemberi pelayanan di Rawat Inap. Indikator ini belum tercapai karena ada beberapa pemberi pelayanan kesehatan yang sedang dalam proses perpanjangan SIPP, namun sudah selesai pada bulan berikutnya.
- 2) Dokter penanggung jawab pasien rawat inap. Indikator ini belum tercapai karena ditemukan adanya jumlah kunjungan/ visite DPJP yang kurang dari jadwal yang telah ditetapkan.
- 3) Jam Visite Dokter Spesialis dengan standar visite dilakukan jam 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja tercapai hanya 95,30% disebabkan karena ditemukan beberapa kali visite dokter spesialis bulan Desember lewat dari jam 14.00 WIB di ruangan teratai
- 4) Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian bunuh diri dengan target 100% sedangkan pencapaiannya hanya 99,95% dikarenakan Masih adanya kejadian pasien jatuh diruang rawat inap disebabkan karena fasilitas yang belum memadai (seperti lantai rusak, dinding kamar mandi tanpa handrail, selokan tanpa grill, atap bocor sehingga lantai menjadi licin) dan kondisi pasien yang gelisah.
- 5) Tidak adanya kejadian adanya kejadian rawat ulang (re-admission) pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan. Indikator ini belum

tercapai karena masih tingginya tingkat ketergantungan keluarga pada perawatan di rumah sakit. Keluarga merasa belum mampu merawat pasien dirumah karena faktor stres, beban, kesibukan atau tidak adanya yang mengawasi pasien selama di rumah.

- 6) Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa standarnya adalah ≤ 6 minggu, pencapaian hanya 98,47% penyebabnya adalah masih adanya keluarga yang belum bisa menjemput pasien setelah di izinkan pulang oleh dokter, walaupun perawat di ruangan dan case maneger telah menghubungi keluarga berulang kali. Selain itu, perawatan pasien dari rekomendasi Donsos sering didropping karena tidak ada keluarga (pasien terlantar)

d. Pelayanan Rehabilitasi Mental

Dari 4 Indikator SPM, semua Indikator sudah mencapai target.

e. Pelayanan Psikologi

Dari 5 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

f. Pelayanan Forensik Psikiater

Dari 5 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

g. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Dari 2 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

h. Pelayanan Radiologi,

Dari 4 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

i. Pelayanan Laboratorium

Dari 4 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

j. Pelayanan Farmasi,

Dari 4 indikator SPM, 3 indikator tercapai sesuai target, sedangkan 1 indikator belum tercapai yaitu Tidak adanya Kejadian kesalahan pernberian obat. Terdapat 1 kasus kesalahan pemberian obat di farmasi rawat inap pada bulan april.

k. Pelayanan Gizi,

Dari 3 indikator SPM, terdapat 1 indikator belum memenuhi standar, yaitu ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien yang sudah terjadwal. Pencapaian tidak maksimal karena masih ada kejadian alat transportasi rusak.

I. Pelayanan Rekam Medis,

Dari 4 indikator SPM, semua indikator terpenuhi target.

m. Pelayanan pengelolaan limbah,

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target.

n. Pelayanan admininstrasi dan manajemen,

Dari 9 indikator SPM, 8 indikator sudah memenuhi target SPM, sedangkan 1 indikator belum memenuhi target indikator yaitu Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun. Pencapaian baru 48% dari standar >60%.

o. Pelayanan ambulance/kereta jenazah

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

p. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Dari 1 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

q. Pelayanan lountry,

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

r. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit,

Dari 3 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

s. Pencegahan dan pengendalian infeksi,

Dari 3 indikator SPM, 2 indikator memenuhi target, dan 1 indikator belum mencapai target yaitu tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih. Target ini tidak terpenuhi karena masih terdapat 2 orang anggota komite PPI belum pelatihan PPI dasar.

Analisis kinerja pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Barat terutama dalam pelayanan kesehatan jiwa, sesuai dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, telah dapat dicapai dengan baik seperti terlihat pada Tabel 11. Pencapaian Kinerja Pelayanan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2022 , sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja Pelayanan RS Jiwa Prof HB Saanin Padang

| PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD - RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No. | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK (PP 6/2008) | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | |
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | BOR (Bed Occupancy Rate) | 60-85 % | 65% | 86% | 87% | 88% | 89% | 89% | 64,00% | 59,49% | 64,00% | 85% | 88% | 65% |
| 2. | LOS (Length Of Stay) | 30-52 Hari | 40 Hari | 44 Hari | 42 hari | 42 Hari | 42 Hari | 42 Hari | 26 Hari | 24,28 Hari | 24,16 Hari | 42 Hari | 42 hari | 32 Hari |
| 3. | BTO (Bed Turn Over) | 3-4 kali | 3 Kali | 4 Kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 7,8 Kali | 8,79 Kali | 9,47 Kali | 4 Kali | 4 kali | 4 Kali |
| 4. | TOI (Turn Over Interval) | 1-3 hari | 1 Hari | 6 Hari | 6 hari | 6 hari | 6 hari | 6 hari | 21 Hari | 16,82 Hari | 14 Hari | 7 Hari | 6 hari | 6 Hari |
| 5. | NDR (Net Death Rate) | - | - | 0,33% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,09% | 0,42% | 0,08% | 0,26% | 0,24% | ≤ 0,24 % |
| 6. | GDR (Gross Death Rate) | - | - | 0,33% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,26% | 0,04% | 0,55% | 0,32% | 0,26% | 0,24% | ≤ 0,45 % |
| 7. | Jumlah Hari Perawatan (HP) | - | - | 100.000 Hari | 107.000 hari | 107.000 hari | 107.000 hari | 107.000 hari | 53.040 Hari | 58.191 Hari | 62,837 Hari | 100.000 Hari | 107.000 hari | 63,583 hari |
| 8. | Jumlah Pasien Masuk | - | - | 1700 org | 2.100 org | 2.100 org | 2.100 org | 2.100 org | 2.279 org | 2.385 | 2,564 org | 1700 org | 2.100 org | 2,570 org |
| 9. | Jumlah Pasien Rawat Inap | - | - | 1700 org | 2.150 org | 2.150 org | 2.150 org | 2.150 org | 2.235 org | 2.515 | 2.724 org | 2300 org | 2.150 org | 2,730 org |
| 10. | Jumlah Pasien Keluar/Pulang | - | - | 1.700 org | 2.100 org | 2.100 org | 2.100 org | 2.100 org | 2.114 org | 2.356 org | 2.538 org | 2000 org | 2.100 org | 2,550 org |
| 11. | Jumlah Hari Perawatan Pasien Keluar/Pulang | - | - | 68.000 Hari | 68.500 hari | 68.500 hari | 68.500 hari | 68.500 hari | 55.373 Hari | 57.195 Hari | 61.308 Hari | 68.000 Hari | 68.500 hari | 63,583 hari |
| 12. | Jumlah Kunjungan Pasien (KP) Rawat Jalan | - | - | 28.000 org | 30.000 org | 30.000 org | 30.000 org | 30.000 org | 26.015 org | 29.519 | 30,606 org | 28.000 org | 30.000 org | 30,650 org |
| 13. | Akkreditasi Standard Pelayanan RS/ISO | | | Akkreditasi | akreditasi | akreditasi | akreditasi | akreditasi | Terakreditasi | Terakreditasi | Terakreditasi | Terakreditasi | Terakreditasi | Terakreditasi |

C. Isu-isu penting dan catatan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof. HB.Saanin Padang.

a. Tingkat Kinerja RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.

Kinerja pelayanan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2022
RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

| Indikator | Target | Realisasi |
|-----------------------|------------|------------|
| BOR | 88% | 64 % |
| AVLOS | 42 hari | 24 hari |
| BTO | 4 kali | 9,47 kali |
| TOI | 6 hari | 13,78 hari |
| NDR | 0,24% | 0,08% |
| GDR | 0,24% | 0,32% |
| Jumlah Pasien Masuk | 2.100 org | 2.564 org |
| Kunjungan Rawat Jalan | 30.000 org | 30.606 org |
| Kunjungan Rawat Inap | 2.150 org | 2.724 org |

Berdasarkan kinerja pelayanan diatas Rata-rata capaian kinerja Pelayanan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang melebihi target yang ditetapkan.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

Permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang antara lain:

1. Kendala dalam Klaim BPJS.
2. Kurang optomalnya kepedulian dan pengetahuan dari SDM Khususnya Tenaga profesional .
3. Kurangnya Dokter Spesialis baik Jiwa dan Non jiwa sehingga masih harus referal ke RS M.Djamil Padang
4. Pengelolaan keluhan pelanggan belum memadai.
5. Belum mencukupi jumlah pegawai yang memberikan pelayanan.
6. Terbatasnya anggaran pelatihan SDM.
7. BOR yang melebihi ideal.
8. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang belum memadai.
9. Peralatan kesehatan yang perlu disempurnakan sesuai standar Rumah sakit.
10. Sarana pendidikan dan pelatihan masih perlu ditingkatkan.
11. Cukup besarnya piutang jasa pelayanan pada pasien BPJS, IPWL dan Dinas Sosial.

12. Terjadinya penurunan pasien rawat jalan disebabkan mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk online dimulai dari RSUD Kelas D,C,B dan A.
13. Terjadinya penurunan pendapatan sehingga tidak mencapai target berakibat kesulitan RS dalam memenuhi biaya operasional RS.
14. Terjadinya Pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program SDGs dan SPM.

Secara umum hambatan dan permasalahan yang ada di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dalam pencapaian SDGs tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena RS Jiwa Prof.HB.Saanin sebagai pendukung pencapaian SDGs hal ini dibuktikan dengan terbukanya akses pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS. Selain dari itu penanganan penderita dengan penyalahgunaan Napza melalui pelayanan pengobatan dan rehabilitasi, sementara untuk pencapaian SPM secara umum sudah tercapai dengan baik walaupun masih perlu ditingkatkan.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang antara lain :

- a. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang merupakan satu-satunya rumah sakit khusus pemerintah dalam pelayanan kesehatan jiwa.
- b. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang ditunjuk sebagai Institusi Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Napza.
- c. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang juga sebagai Institusi Rehabilitasi Napza.
- d. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang merupakan satu-satunya tempat praktik pendidikan khusus pelayanan kesehatan jiwa.
- e. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang merupakan RS rujukan pasien Covid-19.
- f. Sebagai PPK BLUD RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang memiliki kesempatan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat dan keleluasaan penggunaan pendapatan operasional.
- g. Masih adanya lahan yang dapat digunakan dalam pengembangan atau pembangunan rumah sakit.
- h. RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang sudah mendapatkan status akreditasi dengan lulus Paripurna.

4. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2022.

Isu-isu penting yang harus dijawab dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan jiwa, guna ditindak lanjuti dalam program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

- Belum optimalnya kepedulian dan pengetahuan dari SDM khususnya tenaga profesional dan tingginya tuntutan masyarakat yang mengharuskan SDM selalu mengembangkan diri.

Catatan strategis : Dalam melakukan pelayanan bekerja sama dengan tenaga spesialis RS Dr. M.Djamil Padang, Begitu juga spesialis Radiologi, Spesialis Rehabilitasi Medis dari luar, untuk pelayanan lainnya mengoptimalkan SDM yang ada, salah satunya adalah tenaga dokter spesialis yang kendali ke RS setelah menyelesaikan pendidikannya.

- Masih terdapat peralatan kedokteran yang rusak, begitu juga alat kesehatan Non Medis perlu penambahan dan penggantian yang rusak.

Catatan strategis: Mengupayakan perbaikan semua fasilitas pelayanan dilingkungan rumah sakit, serta mengoptimalkan pemakaian peralatan kesehatan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

- Pemenuhan sarana dan prasarana pada Instalasi Napza masih kurang sehingga perlu penambahan untuk meningkatkan pelayanan

Catatan Strategis: meningkatkan layanan pasien jiwa maupun pasien non jiwa dengan memberdayakan tenaga dan sumberdaya yang ada di rumah sakit.

- Berdasarkan surat edaran dari BPJS Kesehatan tentang rujukan berjenjang mengakibatkan jumlah pasien rawat jalan menurun, hal ini disebabkan mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RSUD kelas D,C, B, A.

Catatan Strategis : Melakukan efisiensi terhadap belanja BLUD RS Jiwa Prof.HB. Saanin padang agar dapat memenuhi target belanja 2022.

- Terjadinya pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.

Catatan Strategis :

- Saat ini RSJ sudah Melaksanakan kredensialing pelayanan non jiwa yang terdiri dari pelayanan Penyakit Dalam, Syaraf, Penyakit Anak dan Rehabilitasi Mental ke BPJS Kesehatan. sebagaimana sudah diatur dalam PMK No 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP No. 47 Tahun 2021, dimana RS Khusus dapat melakukan pelayanan 40% dari TT untuk layanan diluar kekhususannya dan RS sudah melakukan addendum MOU dengan BPJS Kesehatan.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat untuk RKPD RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2022 yang akan menjadi usulan pada Musrenbang Provinsi Sumatera Barat. Proses review rancangan awal RKPD berguna untuk menggali dan mengakomodir program yang telah dirancang dapat memenuhi kebutuhan SKPD dalam mencapai target Renstra dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, apabila diperlukan untuk percepatan capaian program dapat diusulkan penambahan sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Setelah dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang akan melanjutkan rancangan awal RKPD tersebut, Adapun rancangan awal analisis kebutuhan RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tabel T-C.31. sebagai berikut:

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat

| No | Rancangan Perubahan RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|--------------|--|-------------|--|----------------|-------------------------|--|--------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Kota Padang | Percentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | 100% 48% | 48.724.119 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Kota Padang | Percentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 100% 48% | 48.724.119 | | | |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Padang | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 95% | 20.724.119 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Padang | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 95% | 20.724.119 | | | |
| a | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Padang | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 335 Orang | 20.724.119 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Padang | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 335 Orang | 20.724.119 | | | |
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah | Kota Padang | Percentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 92% | - | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah | Kota Padang | Percentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 92% | - | | | |
| a | Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan | Kota Padang | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | - | Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan | Kota Padang | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | - | | | |
| 3 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Kota Padang | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | 48% | 28.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Kota Padang | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | 48% | 28.000.000 | | | |
| a | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Kota Padang | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 28.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Kota Padang | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | 1 Unit Kerja | 28.000.000 | | | |
| II | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kota Padang | | | 3.062.392 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kota Padang | IKM | | | 3.062.392 | | |
| 1 | Penyediaan Fasilitas, Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Kota Padang | Percentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | 3.062.392 | Penyediaan Fasilitas, Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Kota Padang | Percentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | 3.062.392 | | |
| a | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Kota Padang | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit | 1 Unit | 800.000 | | | | 1 Unit | 800000 | | | |
| b | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Kota Padang | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang tersedia | 44 Unit | 1.412.392 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Kota Padang | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang tersedia | 44 Unit | 1.412.392 | | | |
| c | Pengembangan Rumah Sakit | Kota Padang | Jumlah fasilitas pengembangan RS yang terbangun | 1 Unit | 850.000 | Pengembangan Rumah Sakit | Kota Padang | Jumlah fasilitas pengembangan RS yang terbangun | 1 Unit | 850000 | | | |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota Padang | | | 155.646 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota Padang | | | | 155.646 | | |
| 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Kota Padang | Percentase Pencapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 48% | 155.646 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Kota Padang | Percentase Pencapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 48% | 155.646 | | | |
| a | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia kesehatan | Kota Padang | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 123 Orang | 155.646 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia kesehatan | Kota Padang | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 123 Orang | 155.646 | | | |
| TOTAL | | | | | 51.942.157 | | | | | | 51.942.157 | | |

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan rujukan khususnya kesehatan jiwa baik yang sifatnya perorangan atau masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

Nama SKPD : RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

| N o | Program/kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Besaran/ volume | Catatan ***) |
|--------|---|--------|--|-----------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi / Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD | Padang | | | |
| | Program Pelayanan dan Penunjang BLUD | Padang | Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang BLUD | Rp. 27.500.000.000 | |
| 2 | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Padang | IKM | Rp. 3.562.000.000 | |

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.

Adapun usulan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Biro Perekonomian sebagai pembina BLUD mengatakan bahwa RS BLUD itu harus mandiri artinya pun tidak bisa lepas dari APBD, bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk perbaikan pelayanan.
2. Mensosialisasikan ke masyarakat terkait peningkatan informasi publik.
3. Mensosialisasikan ke masyarakat terkait pelayanan anak dan remaja seperti gangguan belajar, autism, layanan Napza, dll.

4. Usulan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang terakreditasi menjadi Akreditasi RS Pendidikan, bukan hanya untuk Pendidikan Kedokteran, tapi juga profesi lainnya.
5. BNN Provinsi Sumatera Barat, bukan hanya penangkapan tapi termasuk pembinaan, penguatan lembaga organisasi dan masyarakat. RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang satu-satunya yang memiliki Rawat Inap, permasalahan dilapangan banyak ditemukan permasalahan hukum. Pecandu wajib melaporkan diri dan direhabilitasi di RS dan penyalahgunaan akan ditindak dengan aturan hukum.
6. Diharapkan adanya integrasi dan koordinasi antara RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang, Dinas Sosial dan DUK Capil untuk data kependudukan ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa).
7. Untuk meningkatkan pendapatan, perlu ditingkatkan layanan potensial seperti rawat inap psikiatri, rawat inap Napza.
8. Sosialisasi Pelayanan Non Jiwa ke masyarakat, agar masyarakat mengetahui kalau di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang tidak hanya melayani pasien jiwa tapi juga melayani pasien non jiwa.
9. Diharapkan upaya dari pihak RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang terkait permasalahan lingkungan, Fokus pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa perumahan diluar RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang merehab pasien.
10. Kegiatan pengembangan RS, ada beberapa lokasi lahan kosong, kami bermaksud memanfaatkan sesuai dengan arahan camat. Tempat tsb terpisah dari lokasi RSJ dan ditumbuhi semak belukar dan sampah.
11. Permasalahan Pemagaran, kami berharap solusi keamanan NAPZA, agar akses tersebut dibuka dan pembuatan Pos Security (diperkuat).
12. UKM perlu kerjasama lingkungan sekitar, dan jika ada kebutuhan SDM di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang agar diprioritaskan warga sekitar RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.
13. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.
14. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada masyarakat miskin.
15. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif /penyuluhan tentang kesehatan jiwa baik di rumah sakit, media cetak maupun media elektronik.
16. Melaksanakan *home visite* untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu dan pemulangan / penguburan pasien miskin yang tidak dijemput keluarga.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan 5 tahun ke depan adalah Mandiri dibidang ekonomi, berdaulat dibidang politik dan berkepribadian dalam budaya, RPJMN 2020-2024 berupa sembilan agenda prioritas, bidang kesehatan fokus pada prioritas kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan strategi pada dimensi Pembangunan Manusia melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter, melalui pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia Sehat. Sejalan dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024 yaitu upaya Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui Peningkatan upaya Promotif dan Preventif. Indonesia Sehat dengan fokus penguatan pelayanan kesehatan melalui Paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pemantapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Arah kebijakan Kementerian Kesehatan 2020-2024 adalah Penguatan pelayanan kesehatan primer (*primary health care*), Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (*continuum of care*) dan Intervensi berbasis resiko kesehatan (*health risk*).

Sementara itu arah kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan tugas dan fungsi RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang untuk melanjutkan RPJMD 2021 – 2026 adalah meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan;

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Renja RS Jiwa Prof. HB. Saanin sesuai dengan Renstra 2021-2026. Renja rumah sakit disusun untuk mencapai tujuan yaitu *Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Unggul dan Berdaya Saing*, dengan sasaran *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*. RS Jiwa Prof. HB. Saanin mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terutama dalam upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit secara paripurna yang bertujuan untuk *Meningkatnya Derajat Kesehatan Perorangan* melalui pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk menurunkan angka kematian (GDR), dengan sasaran serta indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Jiwa dengan Indikator Kinerja Utama adalah :
 - a. Tingkat Akreditasi RS dengan target paripurna
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan RS 88%.
2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa dengan Indikator Kinerja:
 - a. Presentase (%) pasien non jiwa yang ditangani dokter spesialis 92%.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Rumah Sakit dengan indikator kinerja adalah:
 - a. Penilaian SAKIP A
4. Meningkatnya Kemandirian keuangan rumah sakit dengan indikator kinerja adalah:
 - a. Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK) 48 %.

C. Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - a. Komponen visi jangka menengah daerah adalah adil, yang dimaksud adil salah satunya yaitu mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik. Dari aspek kesehatan, pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan kualitasnya.
 - b. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi, maka RS.Jiwa Prof. HB.Saanin Padang merupakan salah satu komponen pemerintah daerah untuk mewujudkannya masyarakat yang sehat dan berkualitas.
 - c. Semakin tinggi kualitas hidup masyarakat dengan sehat jasmani dan rohani, maka mempunyai dampak positif untuk pengentasan kemiskinan, karena pasien menderita gangguan jiwa akan menyebabkan mereka tidak produktif.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program yang ada berjumlah 3 program didukung dengan 4 Kegiatan dengan 6 sub kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut:

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - i. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah Provinsi

- i. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- ii. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.
- iii. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - i. Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Perubahan yang terdapat pada Rancangan Akhir

Terdapat 3 (TIGA) perubahan rancangan akhir yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD. Dua poin tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terdapat perubahan pagu menjadi Rp.33.212.741.890,- dari yang sebelumnya sebesar Rp.20.724.119.000,-. Penambahan Gaji dan TPP tersebut disebabkan karena penambahan PPPK sebanyak 53 orang dan kenaikan TPP ASN yang belum di akomodir pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan pada RENSTRA RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2021-2026.

- b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan operasional atau Lapangan.

Pada rancangan akhir terdapat Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan peruntukan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional atau Lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi Renja dengan TAPD pada tanggal 12 Juni 2023, alokasi anggaran untuk pengadaan mobil operasional **ditiadakan**.

Sebelumnya pada rancangan awal, pengadaan mobil operasional berada pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat, di bawah Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Namun setelah permutakhiran sub kegiatan dari Kemendagri, Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional berada pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, di bawah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, alokasi anggaran pada rancangan awal sesedar Rp. 27.500.000.000,-. Sesuai dengan hasil verifikasi renja dengan TAPD pada tanggal 12 Juni 2023 ditetapkan alokasi anggaran belanja BLUD mengacu kepada proyeksi pendapatan yaitu sebesar Rp. 28.000.000.000,-. Terdapat kenaikan sebesar Rp. 500.000.000,-.

BAB IV

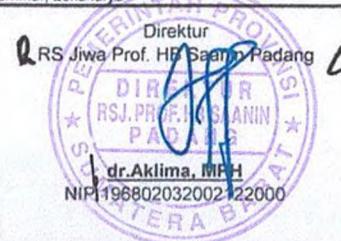
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat. Rencana kerja tahun 2024 RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Indikasi Rencana Kerja dan Pendanaan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 17
Usulan Program dan Kegiatan RS Jiwa Prof HB Saanin Padang Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|--|---|--------|---|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Padang | Percentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | |
| A | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Padang | Percentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 95% | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Padang | Jumlah Pegawai/ASN/P3K yang menerima gaji dan tunjangan | 335 Orang | |
| B | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Padang | Percentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Padang | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | |
| C | Peningkatan Pelayanan BLUD | Padang | Percentase Tingkat Kemandirian Keuangan | 44% | |
| 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Padang | Jumlah Bulan Operasional | 12 Bulan | |
| II | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Padang | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88% | |
| A | Penyedian Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Padang | Percentase Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 92% | |
| I | Pengembangan Rumah Sakit | Padang | Jumlah RS yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan RS yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 | 1 Unit | |
| 1 | Pembangunan Selasar Utama Penghubung Antar Ruangan RS | Padang | Tersedianya selasar utama penghubung antar ruangan RS | 1 Unit | |
| II | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Padang | Terpeliharanya Fasilitas Gedung RS | 1 Unit | |
| 1 | Rehab Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental (Psikososial) | Padang | Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental yang direhab | 1 Unit | |
| III | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Padang | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan | | |
| 1 | Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT | Padang | Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT | 100% | |
| 2 | Pengadaan Alat Kesehatan DAK/APBD (Ambulance 2 unit) | Padang | Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DAK | 100% | |
| 3 | Pengadaan BM Alat Kesehatan (Ruang ICU/HCU-O2 Sentral) | Padang | Terlaksananya Pengadaan BM Alat Kesehatan BLUD | 100% | |
| B | Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Padang | Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | |
| I | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Padang | Terselenggaranya layanan konseling | 100% | |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Padang | Percentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi | 48% | |
| A | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Padang | Percentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi persentase pencapaian pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan tingkat daerah provinsi | 48% | |
| I | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Padang | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | 123 Orang | |
| 1 | InHouse Training | Padang | Terlaksananya InHouse Training | 100 Orang | |
| 2 | Bimtek, Seminar, Lokakarya | Padang | Terlaksananya Bimtek, Seminar, Lokakarya | 23 Orang | |



Tabel. 18
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|---|---|---|--------------------|------------------------|--|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) | Prioritas | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | 64.430.779 | | | | | 53.875.000 |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah | Padang | 100% | 61.212.741 | | | | | 49.929.000 |
| | A Administiasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | 95% | 33.212.741 | | DAU | Operasional | 95% | 20.929.000 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai/ASN/P3K yang menerima gaji dan tunjangan | Padang | 335 Orang | 33.212.741 | P2 | DAU | Operasional | 335 Orang | 20.929.000 |
| | B Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | - | | | | | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Padang | 1 Unit | - | | DAU | Operasional | | - |
| | C Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan | Padang | 44% | 28.000.000 | | BLUD | Operasional | 50% | 29.000.000 |
| 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah Bulan Operasional | Padang | 12 Bulan | 28.000.000 | P2 | BLUD | Operasional | 12 bulan | 29.000.000 |
| II | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Padang | 88% | 3.062.392 | | APBD | investasi | 88% | 3.785.000 |
| | A Penyedian Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Padang | 92% | 3.062.392 | | APBD | | | 3.685.000 |
| | I Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah RS yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan RS yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 | Padang | 1 Unit | 850.000 | | APBD | investasi | 1 Unit | 500.000 |
| 1 | Pembangunan Selasar Utama Penghubung Antar Ruangan RS | Tersedianya selasar utama penghubung antar ruangan RS | Padang | 1 Unit | 850.000 | P2 | APBD | Investasi | 1 Unit | 500.000 |
| II | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang terbangun | Padang | | | | | investasi | | 500.000 |
| 2 | Pembangunan Pengembangan Sarana Air Bersih | Terbangunnya Pengembangan Sarana Air Bersih | Padang | | | | | Investasi | 100% | 500.000 |
| III | Pengembangan Rumah Dinas Tenaga kesehatan | Jumlah pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | investasi | | 1.500.000 |
| 1 | Pengembangan Rumah Dinas | Terbangunnya pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Padang | | | | | Investasi | 100% | 1.500.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|-----------------------------------|---|---|--------------------|------------------------------|---|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,-) | Prioritas | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-) |
| IV | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit | Padang | 1 Unit | 800.000 | | APBD | investasi | | - |
| 1 | Rehab Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental (Psikososial) (DED BLUD) | Terlaksananya Rehab Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental (Psikososial) yang direhab | Padang | 1 Unit | 800.000 | P2 | APBD | Investasi | | |
| V | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan | Padang | Unit | 1.412.392 | | | investasi | 100% | 1.185.000 |
| 1 | Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT | Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT | Padang | 100% | 150.000 | P2 | APBD | Investasi | 100% | 185.000 |
| 2 | Pengadaan Alat Kesehatan DAK/APBD (Ambulance 2 Unit) | Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DAK | Padang | 100% | 900.000 | P2 | APBD | Investasi | 100% | 1.000.000 |
| 3 | Pengadaan BM Alat kesehatan (Ruang ICU/HCU=O2 Sentral) | Terlaksananya Pengadaan BM Alat Kesehatan BLUD | Padang | 100% | 362.392 | P2 | APBD | | | |
| B | Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Padang | | | | | Operasional | 100% | 100.000 |
| I | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Terselenggaranya layanan konseling | Padang | | | | | Operasional | 100% | 100.000 |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Percentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi | Padang | 48% | 155.646 | | APBD | Operasional | 100% | 161.000 |
| A | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Percentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi persentase pencapaian pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan tingkat daerah provinsi | Padang | 48% | 155.646 | | APBD | Operasional | | 161.000 |
| I | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Padang | 123 Orang | 155.646 | | APBD | Operasional | 123 Orang | 161.000 |
| 1 | InHouse Training | Terlaksananya InHouse Training | Padang | 100 Orang | 55.000 | P2 | APBD | Operasional | 100 Orang | 61.000 |
| 2 | Bimtek, Seminar, Lokakarya | Terlaksananya Bimtek, Seminar, Lokakarya | Padang | 23 Orang | 100.646 | P2 | APBD | Operasional | 23 Orang | 100.000 |



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-----------------|---|--|---|---|---|--|---------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | | Unit | - | 1.412.392.000,00 | - Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing | - | - | 1.185.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN | | |
| | 1.02.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | | Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | - Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing | - | 1 Unit | 0,00 | RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN | | |
| 2. | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | - | - | - | - | 155.646.000,00 | | | | | | - | 161.000.000,00 | | | |
| | 1.02.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Percentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi Percentase Pencapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | % | % | % | 48 % 48 % | 155.646.000,00 | | | | | 123 Orang | 161.000.000,00 | | | | |
| | 1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | | Orang | 123 Orang | 155.646.000,00 | - Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing | - | 123 Orang | 161.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN | | |
| | X | - | | | | | | 48.224.119.000,00 | | | | | | | 49.929.000.000,00 | | | |
| | - | - | | | | | | 48.224.119.000,00 | | | | | | | 49.929.000.000,00 | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|----|-------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1. | - | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Percentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i> | % | % | % | 100 % | 48.224.119.000,00 | | | | | | 100 % | 49.929.000.000,00 | | | | | |
| | - | Peningkatan Pelayanan BLUD | <i>Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)</i> | % | % | % | 48 % | 27.500.000.000,00 | | | | | | 1 Unit Kerja | 29.000.000.000,00 | | | | | |
| | - | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> | Unit Kerja | | Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 27.500.000.000,00 | - Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan | PENDAPATAN DARI BLUD | - | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing | - | 1 Unit Kerja | 29.000.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN | | | | |
| | - | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Percentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | % | % | % | 95 % | 20.724.119.000,00 | | | | | | 335 Orang/ Bulan | 20.929.000.000,00 | | | | | |
| | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | Orang/ Bulan | | Orang/ Bulan | 335 Orang/ Bulan | 20.724.119.000,00 | - Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing | - | 335 Orang/ Bulan | 20.929.000.000,00 | RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN | | | | |
| | J U M L A H | | | | | | 51.942.157.000,00 | | | | | | | 51.775.000.000,00 | | | | | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja SKPD RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN 2020-2024, Renstra 2022-2026 Kementerian Kesehatan RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021–2026 dan Rencana Strategis (Renstra) RS Jiwa Prof.HB.Saanin 2022 – 2026.

Hal – hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RENJA Tahun 2024 adalah.

1. Pelayanan pasien yang tidak mampu harus ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dilaksanakan di provinsi dengan program kab/kota, dalam hal pembiayaan maupun tindak lanjut setelah pasien dikembalikan ke masyarakat.
2. Pemerintah Provinsi bersama dengan pemerintah kab/kota menyediakan rumah singgah/panti rehabilitasi untuk pasien yang dipulangkan dari rumah sakit jiwa.
3. Harus ada program/kegiatan untuk penanganan pasien pasung di dalam APBD provinsi dan kab/kota.
4. Meningkatkan penyuluhan dan promosi pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan masalah korban NAPZA.
5. Meningkatkan kerja sama lintas sektor untuk penanganan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi korban Napza.
6. Perlu peningkatan kemandirian Rumah Sakit melalui peningkatan pelayanan BLUD sehingga kegiatan yang belum tertampung dalam APBD dapat direalisasikan dalam pelayanan BLUD.
7. Meningkatkan Akreditasi RS melalui akreditasi SNARS versi 2012 sebagai salah satu syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan status klas Rumah Sakit.
8. Peningkatan pelayanan untuk peserta magang dan praktik mahasiswa kesehatan yang setiap tahun terus bertambah, sehubungan RS Jiwa Prof.HB Saanin sebagai rumah sakit pelayanan kesehatan jiwa di Sumatera Barat.

Peningkatan dan pengembangan pembangunan Rumah Sakit Jiwa

Prof.HB.Saanin Padang baik fisik maupun pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan permasalahan kesehatan di masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Pelaksanaan Rencana kerja tahun 2024 perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mengedepankan azas manfaat, berkeadilan, akuntabel dan transparansi.

Rencana tindak lanjut bila penyusunan rencana kerja Tahun 2024 ini disetujui maka perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan apabila tidak terakomodir seluruhnya maka perlu dicarikan jalan keluar dengan mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat khususnya masalah kesehatan jiwa, namun masih ada terdapat kekurangan dan kelemahannya, untuk kesempurnaan rencana kerja ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Padang, Juli 2023

Direktur

RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang ✓



NIP. 19680203 200212 2 002